



KATALOG BPS : 4102004 .71

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA

WELFARE INDICATORS OF SULAWESI UTARA
2007/2008

<https://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
SULAWESI UTARA**
WELFARE INDICATORS OF SULAWESI UTARA
2007/2008

ISBN	979 488 542 3
Nomor Publikasi	71522.0813
Katalog BPS	4102004.71
Ukuran Buku	21,59 X 29,7 cm
Jumlah Halaman	32 halaman

Naskah

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara

Gambar Kulit

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Optimalisasi potensi daerah pada hakekatnya akan bermuara pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2007/2008**.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007. Data ketenagakerjaan tidak ditampilkan dalam publikasi tahun ini karena sudah ditampilkan dalam publikasi khusus ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Manado, Desember 2008
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara,



Drs. Jasa Bangun, MSi.
NIP. 340005025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	2
1.3 Fertilitas	5
II. KESEHATAN	6
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	6
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	7
III. PENDIDIKAN	12
3.1 Tingkat Pendidikan	12
3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	16
3.3 Fasilitas Pendidikan	17
IV. TARAF DAN POLA KONSUMSI	18
4.1 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	18
4.2 Pengeluaran Rumah Tangga	18
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	21
5.1 Kualitas Rumah Tinggal	22

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara	1
1.2	Persentase dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2007	3
1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Utara, 2004 – 2007	4

KESEHATAN

2.1	Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota, 2006 – 2007	7
2.2	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi, 2006 - 2007	9
2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan menurut Kabupaten/Kota, 2006 - 2007	10
2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2006 – 2007	11

PENDIDIKAN

3.1	Angka Melek Huruf per Kabupaten/Kota, 2007	13
3.2	Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2007	15
3.3	Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah, 2007	16
3.4	Rasio Murid-Guru dan Guru-Sekolah tahun 2006/2007	17

TARAF DAN POLA KONSUMSI

4.1	Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Sebulan	19
-----	---	----

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

5.1	Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan, 2006 – 2007	23
-----	--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Utara, 2003 – 2007	4
2 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Melakukan Perkawinan Pertama Menurut Usia Perkawinan Pertama di Sulawesi Utara, 2007	5
3 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2007	8
4 Angka Buta Huruf per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007	14
5 Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007	20
6 Persentase Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri di Provinsi Sulawesi Utara, 2007	21
7 Persentase Rumahtangga dengan Luas Lantai Rumah < 10 m ² per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007	24
8 Persentase Rumahtangga yang Berlantai Tanah per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007	25

I. KEPENDUDUKAN

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang tidak terkendali adalah sumber dari segala masalah sosial. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Masalah jumlah penduduk terkait erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat.

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Sulawesi Utara yang bertempat tinggal tetap sudah mencapai 2,044 juta jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhan relatif mengalami penurunan diantaranya melalui program KB. Tingkat pertumbuhan yang tinggi secara langsung akan menambah jumlah penduduk usia muda, dan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2000	2,044	
		1,25 (2000-2005)
2005	2,129	
		1,29 (2000-2006)
2006	2,161	
		1,20 (2005-2007)
2007	2,187	

Sumber : Sensus Penduduk 1990&2000, Supas 2005 dan Proyeksi Penduduk 2006 - 2007

Secara absolut jumlah penduduk Sulawesi Utara terus bertambah setiap tahunnya, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk terus menurun. Selama periode 2000-2005 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sudah dibawah 2 persen, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 2,044 juta jiwa pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 2,129 juta jiwa pada tahun 2005. Dua tahun kemudian jumlah penduduk Sulawesi Utara sudah mencapai 2,161 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,20 persen antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Masalah kependudukan bisa menjadi masalah yang serius bagi suatu daerah. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antara kabupaten dan kota tampak masih sangat timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja di daerah kota. Hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, dimana persebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di perkotaan. Dengan luas hanya 6,81 persen dari seluruh luas wilayah daratan Sulawesi Utara, dihuni oleh sekitar 36,45 persen penduduk Sulawesi Utara. Yang terpadat adalah di Kota Manado, dimana setiap 1 Km² dihuni sekitar 2.685 penduduk. Sementara daerah yang jarang penduduknya adalah Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Kep. Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow Utara, dimana di ketiga kabupaten tersebut setiap km² wilayahnya dihuni tidak sampai 60 orang.

Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk adalah masalah perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah perkotaan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

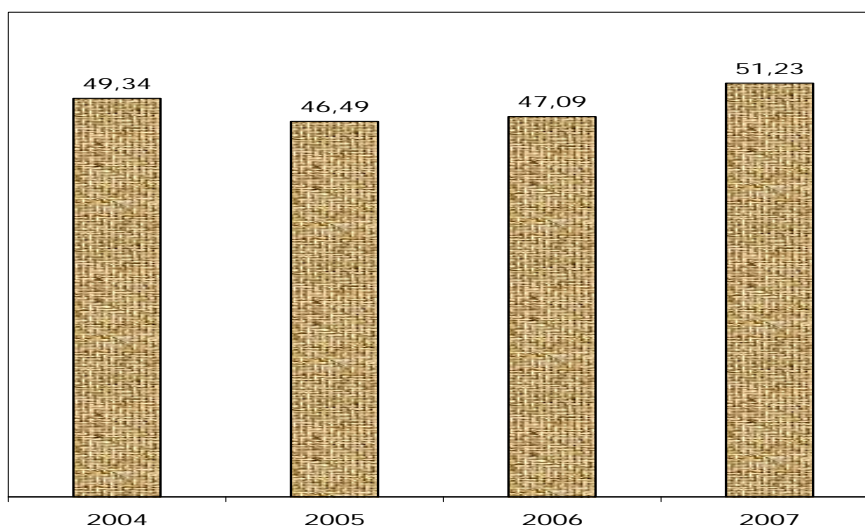
Tabel 1.2 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, 2007

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km²
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	6.230,95	298.271	47,87
Minahasa	1.025,85	296.142	288,68
Kep. Sangihe	625,96	130.129	207,89
Kep. Talaud	1.250,92	74.786	59,78
Minahasa Selatan	1.496,09	182.017	121,66
Minahasa Utara	937,65	172.690	184,17
Bolaang Mongondow Utara	1.696,09	79.042	46,60
Kep. Sitaro	387,07	61.576	159,08
Minahasa Tenggara	583,01	95.002	162,95
Manado	157,91	424.111	2.685,78
Bitung	304,00	174.003	572,38
Tomohon	146,60	82.684	564,01
Kotamobagu	431,50	116.357	269,66
Sulawesi Utara	15.273,60	2.186.810	143,18

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2008

Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pada tahun 2007, angka beban ketergantungan sebesar 51,23 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 51 penduduk usia tidak produktif.

Gambar 1. Angka Beban Ketergantungan Tahun 2004-2007



Struktur umur penduduk Sulawesi Utara berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (dibawah 15 tahun) kurang dari 30 persen, dan proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 6 persen. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun ada sebanyak 26,06 persen pada tahun 2006 turun menjadi 27,82 persen pada tahun 2007. Sedangkan untuk penduduk usia 65 tahun atau lebih, tahun 2006 sebesar 5,95 persen dan naik menjadi 6,05 persen pada tahun 2007.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Di Sulawesi Utara, 2004-2007

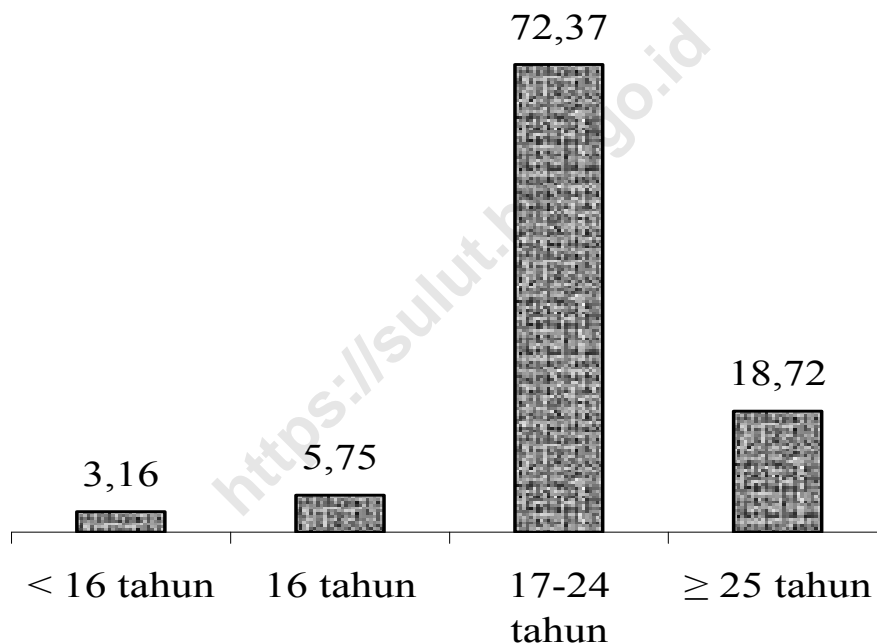
Tahun	0 – 14	15 – 64	65 +	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2004	27.88	66.95	5.17	49.34
2005	26.28	68.26	5.45	46.49
2006	26,06	68,04	5,95	47,09
2007	27,82	66,12	6,05	51,23

Sumber : Susenas

1.3. Fertilitas

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang paling menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Gambar 2 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Melakukan Perkawinan Pertama Menurut Umur Perkawinan Pertama di Sulawesi Utara, 2007



Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2007, ada 3 sampai 4 wanita dari 100 wanita usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang melakukan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 16 tahun.

2. KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Di Sulawesi Utara rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya sedikit menurun dari tahun 2006 ke tahun 2007, yaitu dari 5,26 hari menjadi 5,25 hari. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatannya semakin membaik. Namun bila dilihat per kabupaten/kota, rata-rata lama sakit justru mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Salah satu faktor yang mempengaruhinya mungkin disebabkan karena adanya penambahan jumlah kab/kota di Sulawesi Utara dari 9 kab/kota menjadi 13 kab/kota. Sehingga untuk Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu belum ada data pembandingan. Dibandingkan kabupaten lainnya, Kab. Kep. Sitaro memiliki rata-rata lama sakit terpanjang yaitu 12,22 hari. Dan rata-rata lama sakit yang terpendek adalah di Kota Manado dan Kota Kotamobagu, yaitu sekitar 4 sampai 5 hari.

**Tabel 2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota
di Sulawesi Utara, 2006-2007**

Kabupaten/Kota	Rata – rata Lama Sakit	
	2006	2007
(1)	(2)	(3)
Bolaang Mongondow	3,94	7,36
Minahasa	5,45	6,72
Kep. Sangihe	4,16	5,72
Kep. Talaud	4,03	5,50
Minahasa Selatan	5,05	6,44
Minahasa Utara	3,20	6,09
Bolaang Mongondow Utara	-	5,86
Kep. Sitaro	-	12,22
Minahasa Tenggara	-	7,05
Manado	4,14	4,92
Bitung	4,15	6,71
Tomohon	3,73	6,16
Kotamobagu	-	4,82
Sulawesi Utara	5,26	5,25

Sumber : Susenas

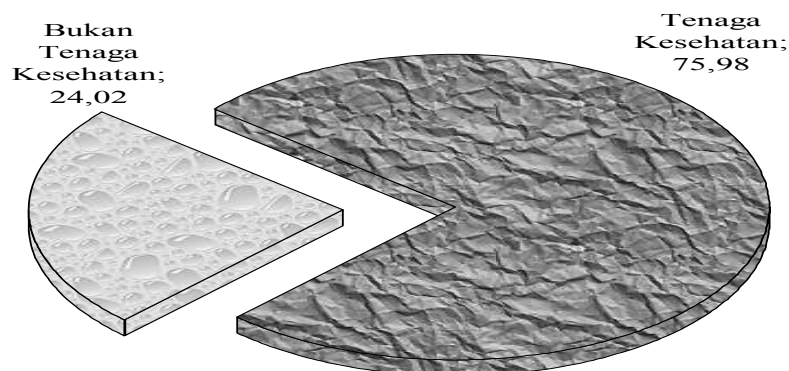
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Pada tahun 2006 di Sulawesi Utara terdapat 74,99 persen persalinan pertama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kemudian meningkat pada tahun 2007

menjadi 75,98 persen. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Persentase persalinan yang ditolong pertama kali oleh bidan mengalami penurunan dari tahun 2006 ke tahun 2007, dan terjadi peningkatan pada persentase persalinan yang ditolong oleh dokter, dari 21,01 persen menjadi 24,96 persen di tahun 2007.

Gambar 3. Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2007



Persalinan pertama yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Beberapa dukun tradisional juga telah memperoleh pendidikan dan pelatihan dari tenaga kesehatan bagaimana membantu persalinan seorang ibu. Pada kenyataannya di masyarakat masih ada 2 sampai 3 wanita yang persalinannya dibantu oleh dukun tradisional. Pada tahun 2007 persentasenya sebesar 22,10, menurun dari tahun 2006 yaitu 23,07 persen. Secara umum persentase persalinan pertama yang dibantu oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini dukun, keluarga dan famili lainnya, pada tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu dari 25,01 persen menjadi 24,02 persen .

**Tabel 2.2 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi
di Sulawesi Utara, 2006-2007**

Indikator	2006	2007
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	74,99	75,98
Dokter	21,01	24,96
Bidan	52,56	48,29
Lainnya	1,42	2,73
Bukan tenaga kesehatan	25,01	24,02
Dukun tradisional	23,07	22,10
Family/keluarga	1,87	1,69
Lainnya	0,07	0,23

Sumber : Susenas

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri, maupun berobat jalan. Mengobati sendiri adalah upaya seseorang yang melakukan pengobatan tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan maupun memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya. Ada 3 jenis pengobatan sendiri, yaitu dengan obat tradisional, obat modern dan obat lainnya selain obat tradisional dan obat modern. Yang dimaksud dengan obat modern adalah obat yang dibeli dari warung atau apotik tanpa resep dokter. Pada tahun 2007, sebanyak 91,67 persen dari penduduk di Sulawesi Utara yang mengalami gangguan kesehatan mengobati sendiri penyakitnya dengan mengkonsumsi obat modern. Ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi obat modern menjadi pilihan utama masyarakat yang berobat sendiri saat mengalami gangguan kesehatan. Tabel 2.3 juga menunjukkan bahwa dari tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi peningkatan persentase penduduk yang mengobati sendiri, baik itu persentase yang berobat dengan obat tradisional, obat modern maupun lainnya.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2006-2007

Kabupaten/Kota	Jenis Obat yang Digunakan					
	Tradisional		Modern		Lainnya	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Bolaang Mongondow	14,98	16,88	91,69	93,34	7,50	10,06
02. Minahasa	23,26	14,09	90,15	94,27	6,54	2,95
03. Kep. Sangihe	24,42	48,04	87,55	94,28	6,56	6,97
04. Kep. Talaud	18,44	11,72	85,51	95,25	8,27	2,82
05. Minahasa Selatan	42,42	16,20	66,97	91,66	24,36	5,48
06. Minahasa Utara	27,61	11,71	85,37	92,71	12,09	5,06
07. Bolaang Mongondow Utara	-	20,99	-	95,21	-	10,85
08. Kep. Sitaro	-	32,82	-	88,06	-	4,41
09. Minahasa Tenggara	-	18,76	-	91,83	-	17,00
71. Manado	32,73	12,63	84,08	82,10	4,09	23,16
72. Bitung	21,24	10,45	96,02	90,70	3,26	3,00
73. Tomohon	17,94	14,81	90,55	90,82	5,76	2,24
74. Kotamobagu	-	21,28	-	86,03	-	10,29
Sulawesi Utara	11,22	16,85	87,54	91,67	7,95	8,04

Sumber : Susenas

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2006 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter dan puskesmas/pustu yang besarnya masing-masing sekitar 27 persen dan 41 persen. Terjadi penurunan persentase penduduk yang berobat di puskesmas/pustu yaitu dari 41,33 persen di tahun 2006 menjadi 31,66 di tahun 2007. Namun di sisi lain dalam periode yang sama terjadi peningkatan persentase penduduk yang berobat ke praktek tenaga kesehatan maupun ke petugas kesehatan sebesar 12,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit pergeseran pola masyarakat dalam berobat jalan di tahun 2007 karena fasilitas kesehatan yang banyak diminati masyarakat tidak hanya

praktek dokter (29,23 persen) dan puskesmas/pustu (31,66 persen) saja namun juga petugas kesehatan/praktek nakes (25,06 persen). Persentase penduduk yang berobat ke rumah sakit baik RS Pemerintah atau RS Swasta masih berkisar 10 – 11 persen di tahun 2007. Dan fasilitas yang paling sedikit diminati penduduk adalah praktek tradisional/batra/dukun yang hanya berkisar 1 persen baik tahun 2006 maupun 2007.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2006-2007

Tempat berobat	2006	2007
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit		
Pemerintah	8,79	7,88
Swasta	5,76	3,04
Praktek Dokter	27,31	29,23
Puskesmas/Pustu	41,33	31,66
Petugas kesehatan/ Praktek Nakes	12,73	25,06
Praktek Tradisional/Batra/ Dukun	0,93	1,07
Lainnya	3,14	2,06

Sumber : Susenas

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain karena faktor kemiskinan keluarga. Upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan pendidikan antara lain terlihat dari usaha Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), yang menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu keluarga miskin agar anak mereka tetap memperoleh pendidikan.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun sebagai peningkatan dari program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk

3.1 Tingkat Pendidikan

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya di Sulawesi Utara pada tahun 2007 sudah mencapai 98,94 persen, sisanya sebanyak 1,06 persen adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	98,41	97,95	98,19
02. Minahasa	99,61	99,16	99,39
03. Kep. Sangihe	98,18	96,07	97,14
04. Kep. Talaud	99,53	98,58	99,05
05. Minahasa Selatan	98,80	98,81	98,8
06. Minahasa Utara	99,16	98,98	99,07
07. Bolaang Mongondow Utara	96,30	96,01	96,16
08. Kep. Sitaro	99,10	99,41	99,25
09. Minahasa Tenggara	99,35	99,59	99,47
71. Manado	100,00	99,70	99,85
72. Bitung	99,26	98,45	98,86
73. Tomohon	99,51	99,30	99,41
74. Kotamobagu	99,63	99,21	99,43
Sulawesi Utara	99,15	98,73	98,94

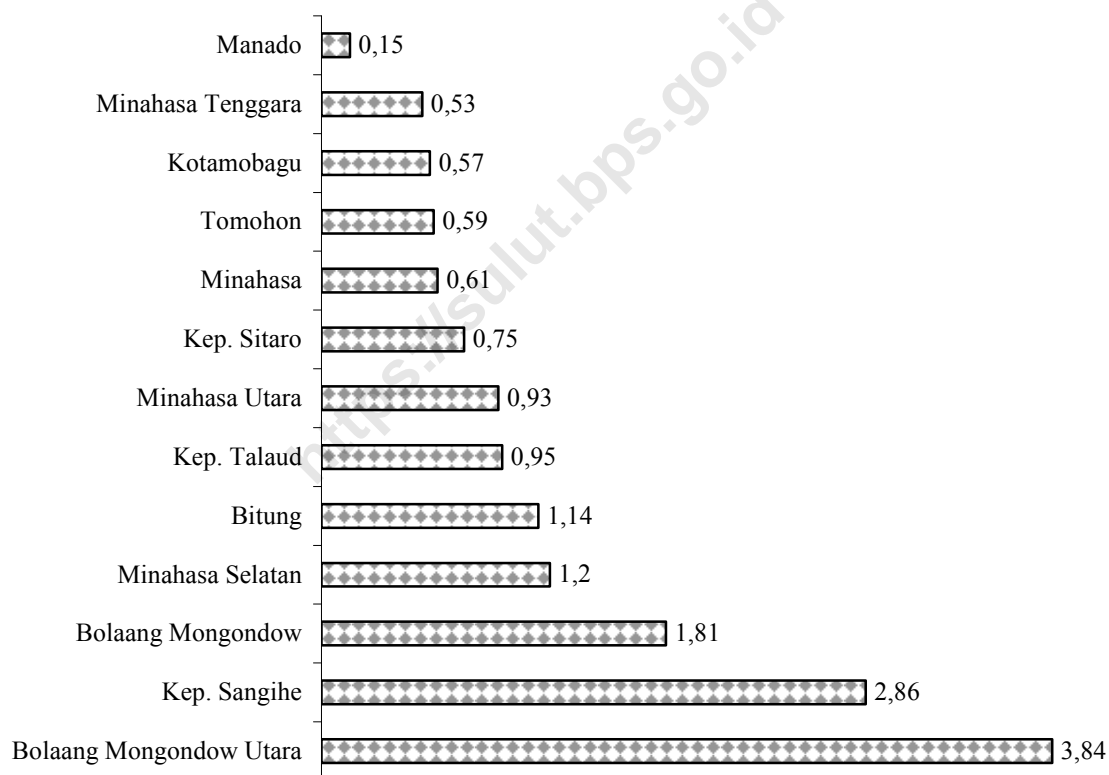
Sumber : Susenas 2007

Jika dilihat menurut jenis kelamin, Angka Melek Huruf penduduk laki-laki pada tahun 2007 sebesar 99,15 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan 98,73 persen. Kondisi ini juga berlaku di hampir seluruh Kab/Kota kecuali Kabupaten Minahasa Selatan, Kep. Sitaro, Minahasa Tenggara dan Kota Bitung. Namun angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh perbedaannya. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam hal pendidikan di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Bahkan di Kota Bitung angka melek

hurufnya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Tabel 3.1 juga menunjukkan bahwa 100 persen laki-laki di Kota Manado bisa membaca maupun menulis. Dibanding kabupaten/kota lain, fasilitas pendidikan di Kota Manado memang paling lengkap dan memadai.

Pada periode 2006-2007, terjadi kenaikan angka melek huruf di Kabupaten Minahasa, Kep. Talaud dan Kota Manado. Hal ini dapat menunjukkan terjadinya perbaikan dalam sistem pendidikan yang diterapkan di kabupaten/kota tersebut dalam setahun terakhir. Jika dilihat per kabupaten/kota, angka buta huruf terendah terdapat di Kota Manado yaitu sebesar 0,15 persen sedangkan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 3,84 persen (gambar 3).

Gambar 4. Angka Buta Huruf Per Kabupaten/kota di Sulawesi Utara, 2007



Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Sedangkan gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah.

Sekitar setengah penduduk usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara sudah menamatkan pendidikan minimal SLTP (53,86 %) dan sisanya adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak punya ijazah (21,11%) dan tamat SD (25,03%).

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase laki-laki dan perempuan yang menamatkan pendidikan sampai dengan SLTP ke atas hampir sebanding. Namun secara umum, persentase laki-laki (54,22%) sedikit lebih banyak daripada persentase perempuan (53,48%) yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di bidang pendidikan di Sulawesi Utara hampir tidak ada. Kesempatan laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan hampir sama.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2007

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	21,02	21,21	21,11
Sekolah Dasar	24,76	25,31	25,03
SLTP	22,62	21,42	22,03
Sekolah Menengah/SMU	21,56	20,62	21,10
SM Kejuruan	4,47	5,76	5,10
Diploma I/II	0,64	0,98	0,81
Diploma III/Sarmud	1,01	0,93	0,97
Diploma IV/S I	3,73	3,62	3,68
S2/S3	0,19	0,15	0,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2007

3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tahun 2007, APS Sulawesi Utara pada anak usia 7-12 tahun mencapai 97,55 persen (Tabel 3.3). Pada anak usia 13-15 tahun, APS menurun menjadi sekitar 87,79 persen. Sementara kelompok usia 16-18 tahun lebih tajam lagi penurunannya menjadi sekitar 56,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2007

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	97,01	98,10	97,55
13 – 15	86,80	88,91	87,79
16 – 18	51,96	60,73	56,21

Sumber : Susenas 2007

Sama halnya dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, dimana hampir tidak ada ketimpangan gender antara laki-laki maupun perempuan, APS laki-laki maupun perempuan hampir sama. Dari 100 anak usia 7-12 tahun, sebanyak 97 sampai 98 orang diantaranya masih bersekolah. Demikian pula penduduk di usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun sudah lebih dari 50 persennya masih bersekolah. Namun bila kembali dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, secara umum APS perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki di tiap tingkatan usia sekolah baik usia 7-12 tahun, 13-15 tahun maupun 16-18 tahun.

3.3 Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak maupun guru bantu untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Guru dan Sekolah merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pendidikan. Tabel 3.4 menggambarkan rasio murid terhadap guru dan guru terhadap sekolah, yang merupakan suatu indikasi mulai efektifnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Dilihat dari jenjang pendidikan di Sulawesi Utara untuk tahun ajaran 2006-2007, rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP adalah yang terkecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SLTA. Di tingkat SD/MI, 1 orang guru mengawasi hampir sekitar 18 sampai 19 murid. Sedangkan untuk jenjang SLTP/MTs, 1 orang guru mengawasi 16 sampai 17 orang murid dan untuk jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK, 1 orang guru mengawasi 18 sampai 19 orang murid.

Bila dilihat dari rasio guru terhadap sekolah di setiap jenjang pendidikan, maka di jenjang pendidikan SD/MI distribusi tenaga guru lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SLTP/MTs dan SLTA yaitu antara 6 sampai 7 orang guru dalam 1 Sekolah Dasar sedangkan untuk SLTP/MTs ada 10-11 guru dalam 1 sekolah SLTP/MTs dan ada 14 sampai 15 orang guru dalam 1 sekolah SLTA/MA/SMK.

Tabel 3.4 Rasio Murid –Guru dan Guru-Sekolah tahun 2006/2007

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Guru terhadap Sekolah
(1)	(2)	(3)
SD / MI	18,23	6,66
SLTP / MTs	16,30	10,48
SLTA / MA / SMK	18,44	14,41

Sumber : Sulut Dalam Angka 2008

4. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

4.1 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Ini disebabkan peningkatan pengeluaran per kapita lebih rendah dibandingkan peningkatan laju inflasi yang mencapai sekitar 90 persen selama tahun 1997-1998. Walaupun sudah mulai menuju ke arah perbaikan, namun dampak krisis ekonomi ini ternyata masih terasa sampai saat ini, terlebih lagi dengan terus meningkatnya harga berbagai barang dan jasa.

4.2 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada

kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa 59,79 persen dari pengeluaran rumahtangga dipergunakan untuk makanan pada tahun 2007. Dan 40,21 persen sisanya dikeluarkan untuk bukan makanan. Ini menggambarkan bahwa hampir 60 persen pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Utara masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Tabel 4.1 Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan selama Sebulan, 2007

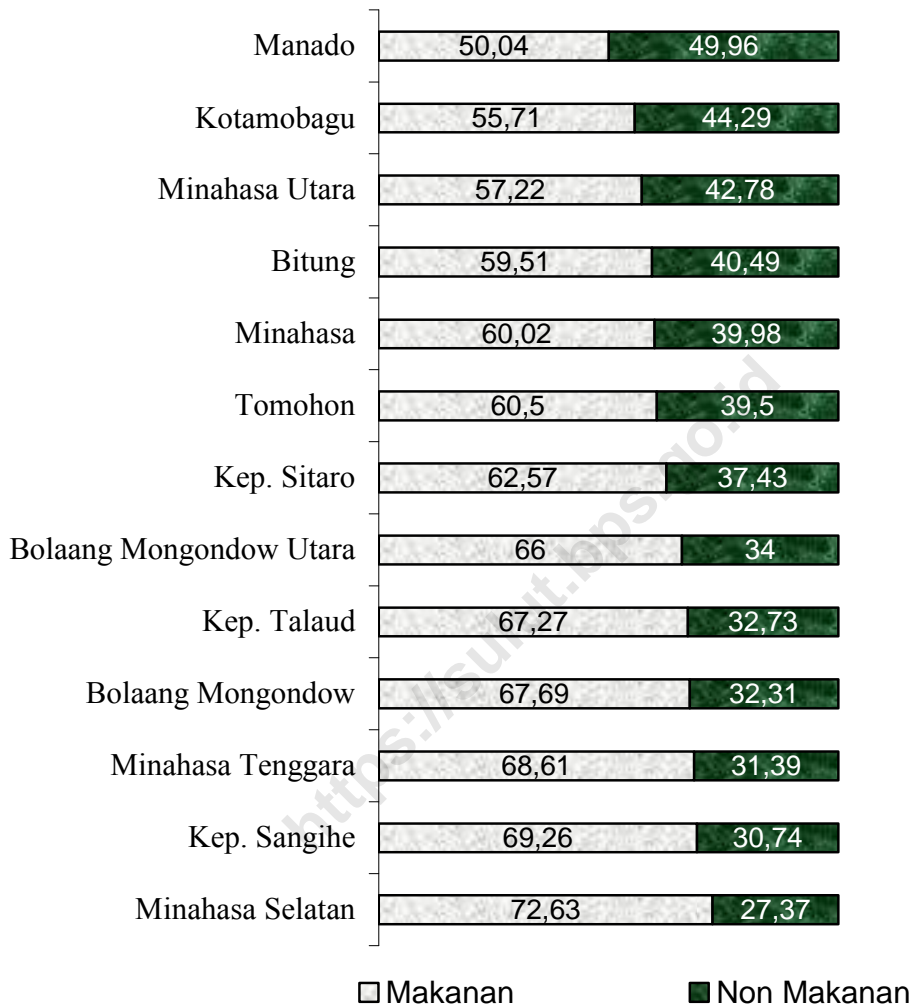
Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	
	Nominal	Persentase
(1)	(2)	(3)
Makanan	189.015	59,79
Non Makanan :	127.128	40,21
Perumahan	65.269	20,65
Barang dan Jasa	39.272	12,42
Pakaian	11.715	3,71
Barang Tahan Lama	5.542	1,75
Lainnya	5.330	1,69
Jumlah	316.143	100,00

Sumber : Susenas 2007

Gambar 4 memperlihatkan besarnya pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan menurut kabupaten/kota. Di Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara, antara 50-60 persen pendapatan perkapita penduduknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Di kabupaten lainnya persentase tersebut malah lebih besar, berkisar antara 60-73 persen. Persentase pengeluaran penduduk untuk non makanan tertinggi di Kota Manado. Ini menyiratkan

secara rata-rata tingkat kesejahteraan di wilayah itu merupakan yang terbaik di Sulawesi Utara.

Gambar 5. Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007

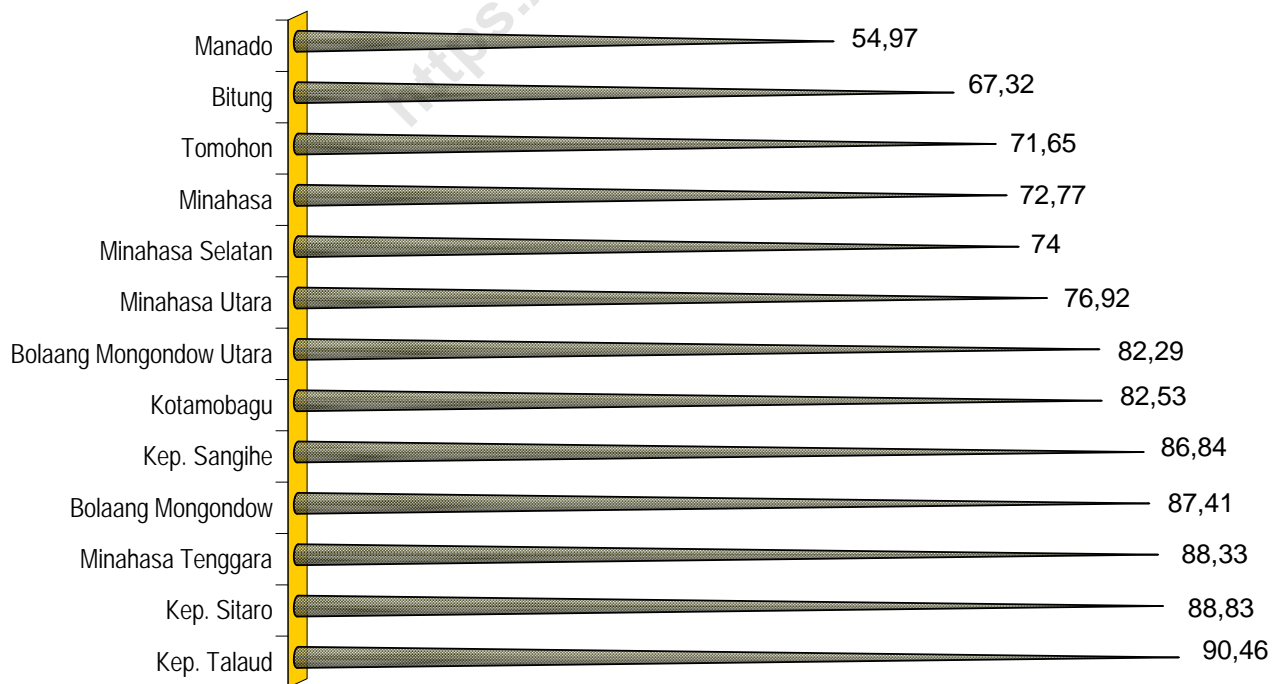


5. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Gambar 6. Persentase Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2007



74,65 persen rumahtangga di Provinsi Sulawesi Utara menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, kos, rumah dinas, rumah bebas sewa, rumah milik orangtua, dan lainnya. Dari gambar 6 terlihat bahwa rumahtangga di Kota Manado yang menempati rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya, yaitu sebesar 54,97 persen. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Manado dibandingkan kab/kota lainnya.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

5.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Pada tahun 2007 rumahtangga di Sulawesi Utara yang memiliki luas lantai tempat tinggalnya kurang dari 10m per anggota rumahtangga masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 32,64 persen.

Tabel 5.1 Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan di Sulawesi Utara, 2006 – 2007

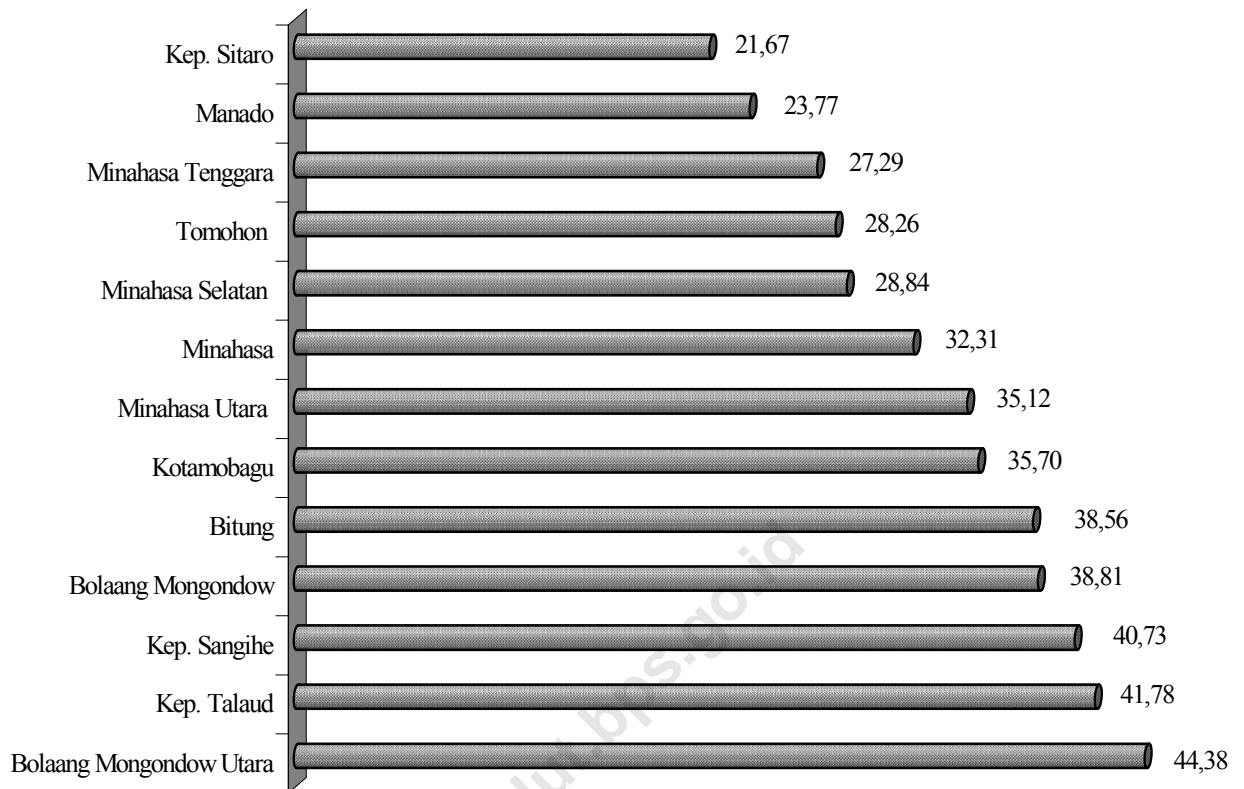
Indikator	2006	2007
(1)	(2)	(3)
Kualitas		
Lantai Tanah	9,50	8,19
Atap Layak *	93,55	92,23
Dinding Permanen	93,33	92,07
Fasilitas		
Luas Lantai per kapita ≤ 10 m ²	32,64	32,64
Air Minum Leding & Kemasan	32,81	26,60
Air minum bersih **	58,38	56,36
Jamban Sendiri	64,74	61,99

Catatan : * Tidak beratap dedaunan

** Air yang bersumber dari leding, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah ≥10m

Jika dilihat per kabupaten/kota pada Gambar 7, masih ada sebanyak 44,38 persen rumahtangga di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tinggal di rumah yang mempunyai luas kurang dari 10 m². Dalam hal ini jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten/kota dengan persentase terbesar. Hal ini lazim ditemui di Provinsi Sulawesi Utara karena hubungan kekerabatan yang masih erat, sehingga beberapa anggota rumahtangga yang sudah berkeluarga menempati rumah yang sama dengan keluarga-keluarga lain yang masih memiliki ikatan persaudaraan. Sementara itu, persentase terkecil rumah tangga yang mempunyai luas lantai rumah kurang dari 10 m² adalah Kabupaten Kepulauan Sitaro (21,67%).

Gambar 7 . Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Rumah < 10 m² Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007

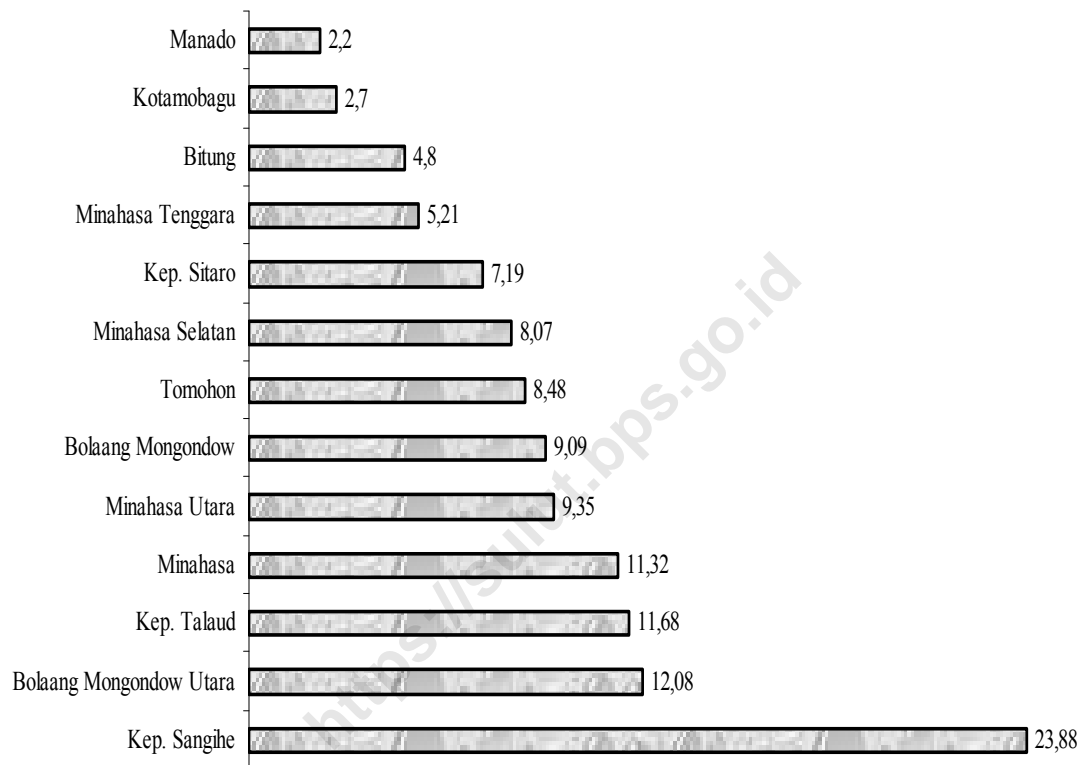


Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacingan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2007, masih ada 8,19 persen rumahtangga di Sulawesi Utara yang berlantaikan tanah, lebih rendah dibanding tahun 2006 yang mencapai 9,50 persen. Semakin rendah persentase rumahtangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumahtangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Sebagian besar masyarakat di Sulawesi Utara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun

2007 menunjukkan bahwa terdapat 92,23 persen rumahtangga yang tinggal di rumah yang beratap layak. Persentase ini menurun 1,32 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga dinding, sebanyak 92,07 persen rumahtangga di Sulawesi Utara rumahnya berdinding permanen.

Gambar 8. Persentase Rumahtangga Berlantai Tanah Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2007



Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2007, rumahtangga di Sulawesi Utara yang menggunakan air leding dan air kemasan mencapai 26,6 persen.

Bila dibandingkan dengan tahun 2006 ada penurunan hampir persen. Masalah ini sangat membutuhkan peran pemerintah terutama bagi instansi terkait agar lebih memperhatikan kebutuhan air minum.

Sumber air bersih yang lain adalah dari pompa dan sumur/mata air terlindung. Jarak yang ideal antara pompa dan sumur/mata air terlindung ke tempat pembuangan limbah adalah lebih dari 10 m. Yang dimaksud dengan jarak disini adalah jarak sumber air minum dengan tempat pembuangan limbah terdekat. Tempat pembuangan limbah terdekat dalam hal ini bisa milik rumahtangga itu sendiri, bisa juga milik tetangga sekitar. Pada tahun 2007 tercatat sebesar 56,36 persen rumahtangga pengguna air bersih di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 2,02 persen jika dibandingkan dengan tahun 2006, dimana terdapat 58,38 persen rumahtangga dari seluruh rumahtangga di Sulawesi Utara yang sumber air minumnya adalah air kemasan, air leding, pompa dan sumur/mata air yang berjarak ≥ 10 meter dari tempat pembuangan limbah.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2006 terdapat 64,74 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri, dan kemudian sedikit menurun pada tahun 2007 menjadi sebesar 61,99 persen. Hal-hal tersebut di atas merupakan suatu gambaran betapa perlunya membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya fasilitas-fasilitas tersebut untuk kesehatan lingkungan.

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara**

Jl. 17 Agustus Manado 95119

Telp : (0431)847044, Fax : (0431)862204

Homepage : <http://sulut.bps.go.id>

E-mail : bps7100@bps.go.id